

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaannya Indonesia sebagai negara yang memiliki identitas kepulauan telah membangun negaranya melalui pembangunan nasional pada periode Soeharto melalui pembangunan Infrastruktur yang ditekankan untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan salah satu negara yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan terhadap pembangunan tersebut adalah Jepang. Bantuan diberikan melalui proyek bantuan pembangunan pemerintah, *Official Development Assistance* (ODA).¹ Namun dalam perjalanannya pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pada periode 2014-2019, China datang menjadi investor terbesar di Indonesiatertekhususnya dalam sektor Infrastruktur. Jika melihat lebih jauh pada periode pertama pemerintahan Jokowi, ia mengedepankan infrastruktur dan juga Indonesia sebagai negara maritim sebagai haluan politik luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Dan salah satu strategi untuk mewujudkan kepentingan yang dibawa pada masa pemerintahannya, Jokowi mempererat hubungan diplomatiknya dengan China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI).

BRI adalah sebuah program kebijakan dan investasi jangka panjang lintas benua yang memiliki tujuan untuk infrastruktur pembangunan dan percepatan integrasi ekonomi negara-negara di dunia di sepanjang jalur sutra yang bersejarah. Inisiatif yang diprakarsai oleh Presiden Xi

¹ Japan International Cooperation Agency (JICA), 'Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan', *Perpustakaan JICA*, (April, 2018), 1.

Jinping pada tahun 2013 ini merupakan inisiatif global berdasarkan sifat membangun jalur sutra yang bersejarah yang menempatkan fokus utama pada negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah, sebuah kawasan yang sebagian besar terdiri dari pasar negara berkembang melalui jaringan darat dan maritim dengan maksud meningkatkan integrasi regional, meningkatkan perdagangan serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya kebijakan inovatif ini bernama *One Belt One Road* (OBOR), namun kemudian OBOR berkembang dan semakin populer dengan sebutan *Belt and Road Initiative* (BRI). Secara garis besar resmi, BRI bertujuan untuk “mempromosikan konektivitas Benua Asia, Eropa dan Afrika dan laut yang berdekatan, membangun, dan memperkuat kemitraan diantara negara-negara di sepanjang *Belt and Road*, mendirikan semua dimensi, jaringan konektivitas multi-tingkat dan komposit, dan mewujudkan pembangunan yang terdiversifikasi, mandiri, seimbang, dan berkelanjutan di negara-negara”.²

BRI terdiri dari 2 jalur antara lain *The Silk Road Economic* atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan-jalur lintas benua ini menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Rusia dan Eropa melalui darat yang mencakup 6 koridor pembangunan. Dan *The 21st Century Maritime Silk Road* atau jalur sutra berbasis laut, rute laut yang menghubungkan wilayah pesisir China dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara, Pasifik Selatan, Timur Tengah serta Afrika Timur, hingga sepanjang jalan ke Eropa. Kerja sama Inisiatif BRI didasarkan pada 5 prioritas utama, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, integrasi keuangan, perdagangan tanpa hambatan, dan hubungan *people-to-people*. BRI juga sering dikaitkan dengan

² BRI, ‘Belt and Road Initiative’ (Belt road initiative.com) <<https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/>>, diakses 27 Februari 2021, pukul 19.21 WIB.

program investasi besar dalam pembangunan infrastruktur untuk jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi.³

Data dari *European Bank for Reconstruction and Development* jumlah negara yang bergabung dengan BRI per Maret 2020 dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan China sejumlah 138 negara⁴ dan salah satunya adalah Indonesia yang juga telah sepakat melakukan kerja sama dengan program kebijakan *Belt and Road Initiative* China melalui berbagai bentuk pendanaan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur guna peningkatan ekonomi politik Indonesia.⁵ Kesepakatan yang terjadi antara keduanya semakin terlihat jelas semenjak Joko Widodo terpilih sebagai presiden pada pemilihan umum presiden 2014 yang membawa perubahan kebijakan di banyak bidang, termasuk haluan politik luar negeri.

Dapat dikatakan kebijakan BRI yang diinisiasikan oleh China sejalan dengan politik luar negeri Jokowi pada masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla yang dipaparkan beliau pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang memuat visi misi pemerintah Indonesia dan kepentingan nasional untuk Indonesia selama 5 tahun kedepan. Terdapat 7 misi yang akan ditempuh di masa periode Jokowi-JK 2014-2019, beberapa diantaranya adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menompang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

³European Bank for Reconstruction and Development, 'Belt and Road Initiative' (ebrd.com) <<https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html>>, diakses 27 Februari 2021, pukul 20.22 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ Artha Yudilla, 'Kerjasama Indonesia Cina dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang dan Ancaman Untuk Indonesia', *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(1) (April, 2019), 60.

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; mewujudkan politik luar negeri bebas aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim; mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Dan untuk menunjukkan prioritas agenda aksi dalam pemerintahan Jokowi-JK ke depan, dirumuskanlah Sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA.⁶

Sehingga Presiden Joko Widodo melihat adanya peluang di dalam BRI, karena jika dilihat dari kepentingan nasional kedua negara sangat memungkinkan untuk melakukan kerja sama. Terlebih dari sisi ekonomi keberadaan BRI dapat memberikan keuntungan bagi pemerintahan Indonesia jika disikapi dengan tepat, hal ini dikarenakan dengan adanya proyek BRI akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, muncul rumusan masalah yaitu “Mengapa Indonesia di era Joko Widodo melakukan kerja sama dengan China melalui BRI jika dilihat dari perspektif politik luar negeri Indonesia?”

C. Literature Review

Dalam memahami alasan kerja sama yang dijalin oleh Indonesia dengan China melalui *Belt and Road Initiative* penulis melakukan kajian pustaka baik dalam bentuk penelitian maupun tulisan terdahulu. Kajian yang dilakukan tetap memperhatikan relevansi antara penelitian

⁶ KPU, ‘VISI-MISI PROGRAM AKSI Ir. H. Joko Widodo-Drs.H.M. Jusuf Kalla Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014’, <https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf>, diakses 14 Oktober 2021, pukul 09.13 WIB.

yang sedang dilakukan dengan penelitian yang dijadikan bahan kajian pustaka.

Dalam jurnal kajian lemhannas RI yang ditulis oleh Sindy dan Dairatul pada tahun 2019 dengan judul “Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program *Belt and Road Initiative*” mengatakan bahwa kerja sama antara keduanya salah satunya dalam proyek infrastruktur tidak lain karena keduanya memfokuskan kebijakan luar negeri masing-masing dalam sektor infrastruktur. Dikatakan pula bahwasanya BRI menjadi sebuah wadah yang tepat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek pembangunan karena dibawah kepemimpinan Jokowi, ia lebih memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur, pembangunan transportasi darat maupun transportasi laut, dan program pembangunan lainnya.⁷

Dalam *Journal of Diplomacy and International Studies* yang ditulis oleh Artha Yudilla dengan judul “Kerja sama Indonesia Cina dalam Belt and Road Initiative Analisa peluang dan ancaman untuk Indonesia”, hasil penelitian ini mengatakan bahwasanya tujuan dari BRI untuk mempromosikan infrastruktur dan pengembangan konektivitas sejalan dengan upaya pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya, terkhusus dalam mempromosikan konektivitas dalam negeri dan daerah, karena adanya BRI merupakan alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.⁸

⁷ Sindy Yulia Putri dan Dairatul Ma'arif, 'Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program Belt and Road Initiative', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 39, 9(7), (2019), 53-63.

⁸ Yudilla, *Op.Cit.*, 51-50.

D. Landasan Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep yang terbentuk dari abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang memiliki tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi. Setiap penelitian selalu disertai pemikiran teoritis, karena antara teori dan fenomena atau peristiwa yang akan dikaji memiliki hubungan timbal balik. Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep sehingga dapat membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.⁹ Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Menurut Kerlinger (1978) teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori berupa sebuah penjelasan atau hal yang menjelaskan tentang sebuah sistem yang mendiskusikan bagaimana sebuah fenomena terjadi dan mengapa fenomena itu terjadinya demikian (Christensen, Johnson, Turner, & Christensen, 2011; Johnson & Christensen, 2019).

Menurut (Cooper et al., 2006) beberapa fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian, antara lain: (1) Teori mempersempit/membatasi ruang atau kawasan dari fakta

⁹ Sardar Ziauddin, penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Bandung: Mizan, 1996), Hlm 43.

yang akan dipelajari. (2) Teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. (3) Teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpose data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. (4) Teori merangkum suatu pengetahuan tentang suatu objek kajian dan pernyataan yang tidak diinformasikan yang di luar observasi yang segera. (5) Teori dapat digunakan untuk memprediksi berbagai fakta lebih jauh dari yang bisa ditemukan dalam penelitian.¹⁰

1. Konsep Politik Luar Negeri

Menurut Velerie M. Hudson dalam buku *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia* yang ditulis oleh Dr. Nazaruddin Nasution, SH., MA., Politik Luar Negeri adalah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Nasional untuk mencapai tujuannya dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Sehingga Politik Luar Negeri harus memenuhi 3 unsur yaitu: 1. Strategi pemerintah nasional; 2. Tujuan (Kepentingan Nasional); 3. Dunia Internasional (masalah internasional).¹¹ Politik Luar Negeri pada dasarnya merupakan “*action theory*” atau dapat diartikan sebagai kebijaksanaan suatu negara yang ditunjukkan ke negeri lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian dalam Hubungan Internasional yang kompleks karena tidak hanya melibatkan aspek internal namun juga aspek eksternal suatu negara. Sehingga dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan domestik dan eksternal merupakan input yang memberikan pengaruhnya

¹⁰ Ence Surahman, Adrie Satrio, dan Herminarto Sofyan, ‘Kajian Teori dalam Penelitian 2020’, *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1) (Februari, 2020), 50-51.

¹¹ Nazaruddin Nasution, *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bina Insan Cita, 2018), hlm 5.

terhadap politik luar negeri suatu negara yang kemudian dipersepsikan oleh pembuat kebijakan/keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini dapat mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai serta kapabilitas dan sarana yang dimilikinya.¹²

Politik luar negeri memiliki beberapa instrumen diantaranya yaitu: 1. Koperatif (kerja sama); 2. Akomodatif (menyesuaikan); dan 3. Oposisi (bertentangan).¹³ Dan jika dikaitkan dengan kebijakan BRI China, Indonesia menggunakan instrumen kerja sama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya esensi dari politik luar negeri adalah kebijakan luar negeri yang dapat diartikan sebagai kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam urusannya dengan negara lain yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional.

Politik luar negeri pada umumnya dipengaruhi oleh 2 faktor determinan, yaitu: 1. Faktor internal (domestik), dan 2. Faktor eksternal. Faktor internal (domestik) mencakup: 1. Kebutuhan sosio-ekonomi/keamanan; 2. Kekhususan geografis/topografis; 3. Sifat/ciri nasional; 4. Falsafah/struktur pemerintahan; 5. Pendapat umum; 6. Birokrasi; 7. Pertimbangan etis. Sedangkan faktor eksternal mencakup: 1. Struktur sistem; 2. Karakteristik/struktur ekonomi dunia; 3. Tujuan dan Tindakan dari aktor-aktor lain; 4. Masalah global dan regional; 5. Hukum internasional, opini dunia.¹⁴

¹² Yanyan Mochamad Yani, 'Politik Luar Negeri', *Pustaka Ilmiah UNPAD* (2007), 1.

¹³ Nasution, *Op.Cit.*, 7.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15-18.

Politik Luar Negeri yang dibawa oleh Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi-JK adalah politik bebas aktif, dimana disini bebas diartikan sebagai tidak terlibat suatu aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan luar yang menjadi cirikhas perang dingin. Aktif disini maksudnya Indonesia selalu menentang penjajahan dan memajukan perdamaian dunia. Politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif ini berdasarkan pada UUD 1945 yang mana arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional dan salah satunya juga meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.¹⁵ Sehingga jika melihat dari arah politik Indonesia yang bebas aktif dan faktor determinan yang mempengaruhi politik luar negerinya yaitu unsur geografis wilayah Indonesia “Indonesia Raya”, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yaitu persilangan dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia, dan persilangan dua Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional menjadi salah satu doktrin yang memandu dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Konsep ini juga menjadi konsep yang biasa digunakan dalam pembasahan mengenai politik luar negeri. Kepentingan nasional menurut Hans J. Moegenthaus dapat diartikan sebagai suatu upaya negara untuk mengejar kekuasaan (*power*), mengingkat *power* merupakan kunci negara untuk menguasai negara lain.

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton konsep kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan mendasar suatu negara serta faktor yang menentukan pembuat keputusan kebijakan suatu negara

¹⁵ Yanyan Mochamad Yani, ‘Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis’, *Pustaka Ilmiah UNPAD* (2017), 1.

dalam merumuskan politik luar negeri. Yang mana unsur kepentingan nasional menjadi unsur yang menjadi kebutuhan penting bagi suatu negara yang mencakup seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan juga kesejahteraan ekonomi.¹⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa kasus politik luar negeri bisa saja merupakan permasalahan-permasalahan tersebut yang dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri suatu negara apabila penyelesaiannya membutuhkan dimensi luar-negeri, apabila kekuatan nasional negara-bangsa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kepentingan nasional negara muncul karena sumber daya nasional maupun kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara terbatas sehingga memerlukan atau membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kepentingannya dengan cara keluar dari batas negaranya.¹⁷ Yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku dan juga tindakan yang diambil oleh para pemimpin negara terhadap masalah yang terjadi di lingkungan domestik maupun internasional dipengaruhi dengan kepentingan negara. Dan dalam bahasannya mengenai politik luar negeri Indonesia, unsur yang menjadi penting bagi Indonesia adalah mengenai kesejahteraan ekonomi sehingga dari hal ini tentu akan terdapat upaya-upaya yang dilakukan negara untuk memperjuangkan guna mencapai kepentingan nasional Indonesia. Selain itu kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar dan juga penentu para pembuat kebijakan atau keputusan membuat kebijakan berupa politik luar negeri.

¹⁶ Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd. England, 1982, hlm. 7

¹⁷ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hlm.29.

Menurut Donald E. Nuechterlin Kepentingan nasional memiliki 4 jenis dimensi:

- a. Kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal meningkatkan perekonomian negaranya, kepentingan ini dilakukan dengan berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lainnya melalui interaksi hubungan internasional.
- b. Kepentingan tata internasional, kepentingan ini untuk mewujudkan dan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang akan menguntungkan negaranya atau juga dapat dipahami kepentingan yang tercipta karena adanya hasrat negara untuk menguasai atau mendominasi dalam hubungan internasional.
- c. Kepentingan keamanan, dimensi ini diciptakan untuk melindungi negara dari sebuah ancaman dari negara lainnya atau menyangkut untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politik negaranya dari ancaman negara lain.
- d. Kepentingan ideologi merupakan kepentingan untuk memajukan atau memperluas, ideologi suatu negara di dunia internasional. Dan juga mempertahankan atau melindungi ideologinya dari ancaman ideologi lain.¹⁸

E. Hipotesis

Alasan Indonesia di era Joko Widodo-JK melakukan kerja sama dengan China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) antara lain untuk mewujudkan visi misi yang dibawa oleh Jokowi-JK antara lain mencapai kepentingan nasional di lingkup domestik dalam bidang ekonomi, politik melalui pembangunan infrastruktur dan juga lingkup internasional yaitu kepentingan Indonesia di

¹⁸ Umar Suryadi Bakry, 'Pengantar Ilmu Hubungan Internasional', *Jayabaya: University Press* 1987, hlm 38-40.

kawasan Indo-Pasifik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan atau metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif-analisis. Sehingga penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagai adanya saat penelitian dilakukan. Nawawi dan Martini (1994) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana mestinya kemudian bersamaan dengan itu dilakukan upaya pengambilan keputusan kesimpulan umum berdasarkan fakta historis yang ada.¹⁹ Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang digunakan kemudian ditarik kesimpulan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat atau sarana yang membantu penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengembangkan penelitian. Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan dan informasi penelitian ini menggunakan *library research*. Yaitu data diperoleh berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, jurnal, surat kabar, laporan tertulis, dan sumber sejenis, serta juga didukung dengan tinjauan atau studi pustaka. Data sekunder juga diperoleh melalui tinjauan pustaka secara *online* dan pencarian data melalui data online.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen

¹⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 'Penelitian Terapan', (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

(dalam Lexy J. Moleong, 2012: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰ Dalam penelitian ini setelah diperolehnya data, pengelompokkan data yang serupa dan dikumpulkannya data secara keseluruhan, penulis melakukan interpretasi data agar dapat melihat hubungan antara satu dengan yang lain. Tujuannya agar dapat mempertajam fokus pengamatan dan memperdalam masalah yang relevan terhadap pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga akan didapatkan makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lain yang menjadi fokus penelitian.²¹

G. Batasan Penelitian

Pembatasan dalam kajian merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian, tujuannya agar menghindari dari adanya penyimpangan pada objek penelitian sehingga dapat dihasilkan penelitian yang fokus dan terperinci. Berdasarkan dari rumusan masalah pada penelitian, dan untuk memudahkan memahami Politik Luar Negeri Indonesia di era Jokowi yang bekerja sama dengan China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) penulis membatasi penelitian pada tahun 2014-2019 tepatnya setelah Joko Widodo menjadi presiden Republik Indonesia ke-7 pada masa kepemimpinan periode pertama bersama dengan Jusuf Kalla, namun tidak menutup kemungkinan jika terdapat hal-hal terkait akan turut

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2011).

²¹ Firman, 'Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif', *Researchgate* (November, 2018), 2.

disertakan oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah alasan yang melatarbelakangi Indonesia era pemerintahan Jokowi-JK melakukan kerja sama bersama dengan China melalui *Belt and Road Initiative* (BRI).

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab pertama dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dari penelitian dan penjelasan umum mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, *literature review* yang berisi studi pustaka dari penelitian atau studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, landasan teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dan digunakan untuk menarik hipotesis penelitian, metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian yang dipilih teknik pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian, batasan penelitian sebagai fokus kajian dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Sejarah Singkat Pembangunan Infrastruktur Indonesia dan Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo-Jusuf Kalla

Bab kedua dalam penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah singkat pembangunan Infrastruktur Indonesia, dan gambaran BRI China di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai politik luar negeri Indonesia, kesepakatan dan tujuan kesepakatan dalam kerja sama dengan China melalui BRI.

BAB III. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerja Sama dengan China melalui BRI

Bab ketiga dalam penelitian ini akan dijelaskan analisis kepentingan nasional Indonesia di Era Joko

Widodo dan Jusuf Kalla yang ingin dicapai dengan bekerjasama dengan China melalui BRI.

BAB IV. Kesimpulan

Bab keempat merupakan bab yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.